



Pengaruh Persentase Perubahan Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap KAP Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013).
(Rumyati dan Holiawati)
Universitas Pamulang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
(Khayatun Nufus)
Universitas Pamulang

Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi terhadap Kinerja Individu Melalui Kepuasan Pengguna Akhir.
(Endang Ruhiyat)
Universitas Pamulang

Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.
(Eka Kusuma Dewi)
Universitas Pamulang

Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas pada PT Ades Waters Indonesia Tbk. Jakarta Selama Periode 2002-2009.
(Irwan Setiawan)
Universitas Pamulang

Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance).
(Radian dan Nofryanti)
Universitas Pamulang

Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan Studi Kasus : Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan
(Sugiarto dan Sugiyanto)
Universitas Pamulang



**EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG**

**Pelindung
Rektor Universitas Pamulang**

**Penasehat:
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang**

**Penanggung Jawab
Endang Rukiyat**

**Pemimpin Redaksi
Iin Rosini**

**Dewan Redaksi:
Holiawati
Sugiyanto
Yunar Sagara
Ferry Irawan**

**Redaksi Pelaksana:
Nofryanti
Winit Iramati**

**Sekretariat:
Khaerul Umam
Sutini
Guntur Darmawan
Hatim Syayidah Aslami
Saidatunolihah**

ISSN 2339-0567

**Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang Barat-
Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566**

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 3 - Nomor 2, Juli 2015	Halaman
Pengaruh Persentase Perubahan <i>Return on Asset</i> (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap KAP <i>Switching</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor <i>Property dan Real Estate</i> yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013) Rumati dan Holikwati Universitas Pamulang	692
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Khayatus Nufus Universitas Pamulang	711
Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi terhadap Kinerja Individu Melalui Kepuasan Pengguna Akhir. Endang Rubiyat Universitas Pamulang	727
Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Eka Kusuma Dewi Universitas Pamulang	751
Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas pada PT Ades Water Indonesia Tbk. Jakarta Selama Periode 2002-2009 Irwani Setiawan Universitas Pamulang	767
Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) Radianah dan Nofriyanti Universitas Pamulang	782
Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan) Sugianto dan Sugiyanto Universitas Pamulang	817

Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

RADIANSAH dan NOFRYANTI

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Banten

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effect of Character Corporate Executive And Characteristics Of Tax Avoidance in Mining Company Coal sub-sector listed on the Stock Exchange. This study uses secondary data audited financial statements Coal Mining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange, amounting to 7 (seven) Company for 5 (five) years. This study uses multiple regression analysis. All data was tested with Classical Assumption Test, F Test, Coefficient of Determination, Correlation, Test T. From the results of this study indicate Executive Risk as a proxy Character has no effect exhibited significantly against tax avoidance. And Company Size, Leverage and Sales Growth as a measurement tool Characteristics Company, only the size of the Company's significant influence on Taxation.

Keywords: *Character Executive, Corporate Characteristics and Taxation.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan *website* resmi Dirjen pajak pada tahun 2011, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Perbedaan sebesar Rp 6,1 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun dibandingkan pada tahun 2010 penerimaan pajak pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Macrimon dan Wehrung, 1990). Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Low, 2006).

Selain itu karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari Variabel Kontrolnya yaitu berupa Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage*, *Sales Growth* dan NOL (*Net Operating Loss*) (Budiman, 2012). *Size* yaitu ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Hormati, 2009). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk

membiayai investasi. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga maka akan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Diduga perusahaan yang semakin tinggi menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaannya maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya (Kurniasih dan Sari, 2013). *Sales Growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman, 2012).

Pemerintah menganalisis bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan tambang belum sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Bahkan Pemerintah berencana untuk membuat kantor pajak tersendiri yang mengurus sektor pertambangan. Pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke negara belum sesuai keadaan sebenarnya.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan penyelamatan uang negara dari pertambangan, khususnya migas, mencapai Rp.156 triliun.. Bagaimana dengan tambang non migas?

Selama ini, perusahaan tambang bersikukuh bahwa produksi tahunan tambang non migas mereka telah disetujui instansi berwenang. Sebagai contoh, perusahaan yang menandatangani kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB), setiap tahun wajib mendapat pengesahan rencana produksi tahunan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB) dan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) setiap tahun melakukan audit terhadap pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB) untuk menghitung jumlah royalti dan *deadrent* yang harus dibayar perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB). Menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), jumlah total batu bara nasional setiap tahun sebesar 238 juta ton dari perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB), dan 40 juta ton dari perusahaan di luar Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKPPB). Masih menjadi tanda tanya adalah produksi dari perusahaan non PKPPB (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) karena tidak di audit.

Dalam Perusahaan Tambang, Penghindaran pajak dilakukan karena produsen lebih untung melakukan ekspor dan malas untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri. Padahal nilai tambah ekspor bahan tambang jauh berlipat-lipat dari pada ekspor bahan mentah. Beberapa modus penghindaran pajak tambang, antara lain dengan penambangan di luar rencana tahunan, *transfer pricing*, pengeluaran biaya perusahaan satu grup, kontrak *derivative*, pembayaran bunga pinjaman, *non deductible cost*, dan depresiasi.(Anandita Budi Suryana, 2012).

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengertian Pajak tersebut adalah salah satu dari berbagai asumsi yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diutarakan berbeda-beda, namun masing-masing memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Andriani (2000) berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah : “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2003), pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*Regulator*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak

sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya.

2.1.3 Asas Dalam Perpajakan

Teori Klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" (Waluyo, 2011) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
- b. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*
Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.
- d. *Economy*
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave (Laksana, 2001) memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu : azas netralitas (*neutrality*), azas perbaikan (*reformation*), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (*growth and stability*).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2003), yaitu :

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus diabayar.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak

2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Penghindaran pajak yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

2.2.2 Karakter Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran Negara (Budiman, 2012). Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan

oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.2.3 Skema Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Skema penghindaran pajak yang pada umumnya digunakan di Indonesia adalah skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, *Control Foreign Corporation (CFC)* dan *Tax Haven* (Ning Rahayu, 2008).

Adapun skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan adalah sebagai berikut :

2.2.3.1 Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema *Transfer Pricing*

Transaksi *transfer pricing* memiliki 2 dimensi pengertian, yaitu:

1) Dimensi netral

Dalam dimensi ini, pengertian transaksi *transfer pricing* adalah strategi, taktik, dan motif pengurangan beban pajak. Menurut Gunadi (Suandy, 2001) “*Transfer Pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.” Sedangkan menurut Sopar Lumbantoruan (Suandy, 2001) “*Transfer Pricing* adalah penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan dalam satu grup.”

2) Dimensi pejorative

Dalam dimensi ini, pengertian transaksi *transfer pricing* adalah suatu upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke perusahaan yang memiliki jumlah laba lebih kecil sehingga jumlah pajak yang dikenakan lebih kecil atau ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Menurut Gunadi (Suandy, 2001) “*Transfer Pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba secara artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi sehingga perusahaan dapat menghindari pajak.

Sedangkan menurut Charles T. Hongren dan Gary L. Sundem (Suandy, 2001) “*Transfer Pricing* adalah usaha perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara pengalokasian laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.” Transaksi *transfer pricing* juga dapat terjadi antar perusahaan, baik di dalam grup atau dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan yang ingin dicapai dalam transaksi *transfer pricing* antar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan penghasilan global setelah dikurangi pajak.
- b) Mengamankan posisi kompetitif.
- c) Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
- d) Mengurangi risiko moneter.
- e) Mengatur *cash flow* anak/cabang perusahaan yang memadai.
- f) Mengurangi beban pengenaan pajak, dan bea masuk.
- g) Mengurangi risiko pengambilalihan pemerintah.

Transaksi *transfer pricing* yang dilakukan antar perusahaan ditandai dengan adanya hubungan istimewa. Hal yang terpenting dalam menghitung laba kena pajak adalah adanya indikasi hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan.

Skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh *subsidiary company* di Indonesia bermacam-macam, meskipun dengan satu tujuan yaitu untuk mengurangi beban pajak di Indonesia.

2.2.3.2 Praktik Penghindaran Pajak melalui Skema *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi). *Thin capitalization* merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran (Roy Rohatgi, 2006). Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam.

Pada umumnya bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang bukan penduduk di negara peminjam dapat dijadikan pengurang pada penghasilan kena pajak si peminjam, sedangkan deviden tidak dapat dijadikan pengurang. Apabila sebuah perusahaan memutuskan untuk membiayai perusahaannya hampir sebagian besar dengan cara melakukan pinjaman dengan bunga kepada perusahaan induk, maka kewajiban pajak penghasilan anak perusahaan dapat berkurang. Hal ini akan menjadi keuntungan pajak yang besar jika anak perusahaan membayarkan bunga kepada perusahaan induk dikenakan tarif *withholding tax* yang rendah.

Menurut Gunadi (1994), pemberian pinjaman dalam praktik *thincapitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

- 1) *Direct loan*
Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) WPLN langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman tersebut, investor mendapatkan bunga yang besarnya pada umumnya ditentukan oleh pihak investor.
- 2) *Back to back loan*
Pendekatan *back to back loan* investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendepositokan dana investor ke bank atau lembaga keuangan dan selanjutnya bank tersebut memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di Indonesia.
- 3) *Parallel loan*
Pendekatan *parallel loan* investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

2.2.3.3 Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema *Treaty Shopping*

Tax treaty dapat dijadikan objek untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, meskipun tujuan dari *tax treaty* itu sendiri adalah untuk mencegah penghindaran pajak. Thuronyi (2003) menjelaskan praktik *treaty shopping* sebagai berikut:

“A resident of a country that does not have a tax treaty with a particular developing or transition country can simply incorporate a subsidiary in an other country that does (usually one with which the investor’s country also has a treaty) and route its investment through that subsidiary, which will be entitled to the reduced tax rates and other protections available under the treaty.”

Praktik *treaty shopping* menurut Thuronyi dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di Negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty* tersebut.

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian. Menurut Mansury, untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas *tax treaty* yang bersangkutan harus dipenuhi dua syarat :

- 1) Syarat formal (*administrative requirement*) yakni pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah residen dari negara yang mengikat perjanjian tersebut berupa “*Certificate of Resident (CoR)*” yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara *treaty partner*.
- 2) Syarat material (*substantive requirement*), yaitu bahwa wajib pajak di negara *treaty partner* memang benar-benar penduduk (*resident*) di negara *partner* tersebut, bukan residen negara ke tiga.

2.2.3.4 Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema *Control Foreign Corporation (CFC)*

Dalam hal ini praktik penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak melalui *CFC* dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Menurut Arnold ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan *CFC*, antara lain:

- 1) Wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*.
- 2) Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

Upaya Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan

menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

2.2.3.5 Praktik Pemanfaatan Negara *Tax Haven*

Penghindaran pajak internasional melalui pemanfaatan negara-negara *tax haven* merupakan hal penting dan menjadi perhatian sebagian besar negara-negara, khususnya negara maju.

Spitz (2001) dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai *tax haven*, sebagai berikut:

“The term tax haven is generally used to refer to a jurisdiction: where there are no relevant taxes; where taxes are levied only on internal taxable events, but not at all, or low rates, on profit from foreign sources; or where special tax privileges are granted or certain types of taxable persons or events”.

Menurut Spitz (2001) terminologi *tax haven* (pelabuhan pajak) mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak hanya dikenakan atas transaksi-transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri atau adanya perlakuan khusus tipe-tipe transaksi yang terutang pajak.

Negara *tax haven* tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya sangat relatif, yaitu tergantung pada ketentuan masing-masing Negara dalam mendefinisikannya. Suatu negara dapat saja disebut sebagai *tax haven* oleh negara lainnya apabila negara tersebut memberikan suatu insentif dalam kegiatan perekonomian di suatu daerah tertentu dalam wilayah Negara tersebut. Jadi, apakah suatu negara akan diklasifikasikan sebagai negara *tax haven* atau tidak oleh negara lainnya tergantung dari definisi negara *tax haven* yang diberikan oleh negara lain tersebut (Ning Rahayu, 2008).

Karena tidak ada definisi resmi mengenai negara *tax haven*, maka untuk menentukan bahwa suatu negara dapat digolongkan sebagai negara *tax haven* dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut (Mohamad Zain, 2005) :

- 1) Tidak memungut pajak sama sekali atau apabila memungut pajak, maka tarifnya adalah tarif pajak yang rendah.
- 2) Memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank dan/atau rahasia bisnis dan tidak akan mengungkapkan kerahasiaan tersebut kepada siapapun atau negara manapun, walaupun hal tersebut dimungkinkan pengungkapannya berdasarkan perjanjian internasional.
- 3) Tersedia fasilitas alat komunikasi yang modern yang memungkinkan komunikasi ke seluruh dunia tanpa ada hambatan apapun.
- 4) Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari negara asing, baik perorangan maupun badan.
- 5) Adanya promosi dan kepercayaan bahwa Negara-negara *tax haven* merupakan pusat keuangan yang baik dan terjamin.

2.3 Karakter Eksekutif (Pemimpin)

2.3.1 Pengertian Pemimpin

Menurut Kartono (2010), pemimpin merupakan inisiator, motivator, stimulator, dinamisator, dan inovator dalam organisasi. Sedangkan menurut Dubrin (2006) Pemimpin ialah seseorang yang dapat menunjukkan semangat, hasrat, dan memberi inspirasi bagi orang lain agar mencapai kinerja yang lebih baik (bekerja keras) dan menaikkan laba.

Dalam organisasi, pemimpin terbagi dalam tiga strata utama yakni:

- a. *Top manager*: yang tekanan tugasnya pada pelaksanaan administrasi dalam menyusun rencana, *policy* dan laporan terdiri dari pada direksi.
- b. *Middle Manager*: eksekutif pelaksanaan rencana dan *policy* organisasi terdiri dari para kepala bagian.
- c. *Low Manager*: eksekutif di lapangan yang terdiri dari kepala-kepala unit pelaksana, para pengawas di lapangan (Ardana, 2012).

2.3.2 Ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif-efisien.

- a. Sifatnya peka terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpinnya.
- b. Mempunyai kepribadian yang terkontrol tidak emosional, inteligensi tinggi.
- c. Sifat pemberani, tidak egoistis atau individualistis, bertanggung jawab, komunikatif.
- d. Tidak curiga dan berprasangka buruk pada bawahan, tidak fanatik, tidak bersikap pasif.
- e. Memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada aspek teknis dari tugasnya.
- f. Mau menempatkan pembantu-pembantu yang cakap untuk mengisi kelemahannya.
- g. Memiliki sikap terbuka, idenya luas, rendah hati, tidak sombong, mau mendengar aspirasi bawahannya.
- h. Berfungsi sebagai wasit-pemisah, bersikap adil, bijaksana agar setiap individu rela berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dalam iklim psikologis yang menyenangkan.
- i. Berfungsi sebagai penyalur komunikasi (Kartono, 2010).

2.3.3 Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif. Sedang apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinan dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut sebagai pemimpin yang gagal (Kartono, 2010).

Seorang yang bernama Wendel French (2002) mengemukakan tiga faktor yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif yaitu:

- a. Mengidentifikasi ciri-ciri dasar pribadi.
- b. Menyesuaikan skill khusus dengan situasi-situasi khusus.
- c. Berusaha untuk memperbaiki iklim organisatoris (Kartono, 2010).

2.3.4 Peranan Kepemimpinan

Seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk mengingatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya (Siagian, 2009).

Peranan atau fungsi kepemimpinan dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: yang bersifat pengambilan keputusan, interpersonal, informasional, kemudian dijabarkan dalam sepuluh kriteria diantaranya yaitu: pengambilan keputusan, *actuating* atau penggerakkan atau arahan, motivator, pimpinan, perencanaan dan pengawasan (Siagian, 2009).

2.3.5 Karakter Pemimpin

Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda (Budiman, 2012).

Pengertian

Menurut Sriwati Bukit (2010), karakter adalah respon langsung yang dilakukan seseorang terhadap setiap stimulus yang datang dalam keadaan sadar (Goleman), kata karakter itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*caracteer*” yang artinya tanda, ciri atau gambaran yang diukir. Kepribadian seseorang terdiri dari kumpulan watak dan perilaku hidup yang membedakan dirinya dengan orang lain dan inilah yang dikatakan karakter, karakter ini juga tidak tercipta dalam waktu singkat tetapi tercipta dari suatu cara yang terulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan terulang-ulang menjadi sebuah tabiat dan tabiat terulang-ulang menjadi sebuah tata kelakuan dan tata kelakuanlah yang melahirkan sebuah budaya dimana gambaran budaya itulah yang kita sebut sebagai karakter, oleh karena itu karakter bisa tercipta dengan adanya sebuah pendidikan karakter yang menciptakan sebuah cara yang tepat dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku.

Asal Karakter

Sriwati Bukit (2010) menjelaskan, ada dua teori mengenai asal-mula karakter :

- 1) Teori pertama mengatakan bahwa karakter itu seperti gen kita, sudah dibawa sejak lahir, seperti warna rambut dan golongan darah. Artinya, kalau saat ini kita mempunyai sifat pemaarah itu karena kita sudah mempunyai sifat pemaarah sejak dilahirkan.
- 2) Teori kedua mengatakan karakter itu dipengaruhi oleh lingkungan, dimana kalau lingkungan yang membentuk baik maka akan terlahirlah sebuah karakter yang baik tetapi kalau lingkungan yang membentuk jelek maka akan terlahirlah karakter yang jelek juga.

Jenis Karakter

Low (2006) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*.

- a. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.
- b. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990).

2.4 Karakteristik Perusahaan

2.4.1 Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama (R. Soekardono , 1983).

2.4.2 Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- a. Perusahaan Swasta
Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hokum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan Negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.
- b. Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

2.5 Ukuran Perusahaan(Size)

2.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut (Ferry dan Jones, 1979 dalam Panjaitan, 2004), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Sedangkan menurut Yusuf dan Soraya (2004) Vol. 7, No.1, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya *asset* yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh *natural logaritma* dari total aktiva. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan investasi (Ariyanto, 2002). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Abdul Halim, 2007).

2.5.2 Faktor – Faktor Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada tiga faktor utama, yaitu :

- a. Besarnya total aktiva
- b. Besarnya hasil penjualan
- c. Besarnya kapitalisasi pasar

Namun disamping faktor utama diatas, ukuran perusahaan pun dapat ditentukan oleh faktor tenaga kerja, nilai pasar saham, log size, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi.

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aktiva perlu di Ln kan. Logaritma Natural sendiri adalah logaritma yang berbasis e adalah 2,7182818....yang terdefiniskan untuk semua bilangan real positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan nol.

2.6 Leverage

2.6.1 Pengertian Leverage

Perusahaan dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya yang mempunyai masa manfaat jangka panjang atau lebih dari satu tahun. Atas penggunaan aktiva tetap tersebut perusahaan harus menanggung biaya-biaya yang bersifat tetap. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau modal yang berasal dari pemilik, dan bisa juga berasal pinjaman atau hutang. Bila perusahaan menggunakan dana dari pinjaman, maka perusahaan secara rutin akan membayar biaya bunga yang merupakan beban tetap dari perusahaan. Masalah *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dana atau hutang yang menyebabkan perusahaan harus membayar biaya tetap atau beban tetap yang berupa bunga.

Pengertian *leverage* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- Menurut Sartono (1997) *leverage* adalah penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.
- Menurut Warsono (2003) *leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan *asset* atau dana, dan sebagai konsekuensi dari penggunaan ini perusahaan harus mengeluarkan biaya dan beban tetap.
- Menurut Sutrisno (2003) *leverage* adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap.
- Menurut Martono dan Agus Harjito (2002) *leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.

2.6.2 Tujuan Leverage

Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar laba yang diperoleh lebih besar daripada biaya *asset* dan sumber dana atau hutangnya, sehingga akan meningkatkan laba pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan risiko keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan laba yang lebih

rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan laba pemegang saham.

2.6.3 Macam-macam *Leverage*

Leverage pada perusahaan dibagi menjadi dua macam, yaitu *leverage* operasi dan *leverage* keuangan.

2.6.3.1 *Leverage* Operasi (*Operating Leverage*)

Pengertian *leverage* operasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Sutrisno (2003) *leverage* operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan.
- 2) Menurut Warsono (2003) *leverage* operasi dapat di definisikan sebagai penggunaan potensial biaya-biaya operasi untuk memperbesar pengaruh perubahan dalam penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak perusahaan.
- 3) Menurut Hanafi (2005) *leverage* operasi menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan.
- 4) Menurut Awat (1999) *leverage* operasi merupakan ukuran bagi risiko operasi yang dapat diketahui dari biaya tetap untuk kegiatan operasi dan dapat dilihat melalui Laporan Laba / Rugi.

2.6.3.2 *Leverage* Keuangan (*Financial Leverage*)

Pengertian *leverage* keuangan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Sartono (1997) *leverage* keuangan adalah penggunaan dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.
- 2) Menurut Darsono (2007) *leverage* keuangan adalah seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan hutang dan saham istimewa, atau sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (hutang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal.
- 3) Menurut Sutrisno (2003) *leverage* keuangan terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap. Atas penggunaan dana hutang perusahaan setiap tahunnya dibebani biaya bunga.
- 4) Menurut Awat (1999) *leverage* keuangan merupakan ukuran bagi risiko keuangan, dan dapat diketahui dari biaya tetap dari dana hutang yang digunakan.

2.7 Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

2.7.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan adalah ukuran sampai sejauh mana laba per saham dari suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh utang. Pertumbuhan ini akan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak, sehingga pendanaan perusahaan yang menggunakan utang dengan beban bunga sebagai pengurang pajak dapat

meningkatkan laba bersih sehingga laba per saham juga ikut meningkat. Akan tetapi, hal ini terjadi hanya selama laba sebelum pajak dan bunga tersebut lebih besar daripada beban bunga dari pendanaan dengan utang tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memperhatikan pertumbuhan penjualan perusahaan tiap periodenya.

3 METODE RISET

Populasi Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.

Sampel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan Tambang Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.1 Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2009). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah seperti berikut ini:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan serta diaudit untuk 5 (Lima) tahun terakhir, yaitu 2010-2014.
2. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan yang disajikan secara lengkap pada tahun 2010-2014.
3. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan dengan data-data yang dibutuhkan secara lengkap untuk menghitung variabel-variabel pada penelitian ini. Data-data tersebut seperti : *total debt*, *total equity*, *total assets* dan penjualan.
4. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sub sektor pertambangan batu bara (perusahaan industri penghasil bahan baku utama batu bara).
5. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sub sektor pertambangan batu bara yang memiliki laba bersih positif pada tahun 2010-2014.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Untuk dapat memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Dimana dalam penelitian ini data diperoleh dari informasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010 – 2014. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah pihak

lain). Sumber data laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2010 – 2014 yang diperoleh dari www.idx.co.id.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi - informasi serta data – data yang diperlukan dengan cara mempelajari dan mengkalsifikasi dokumen - dokumen atau bahan-bahan yang tertulis yang relevan, baik dari kepustakaan maupun pencarian melalui internet.

Data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2010 – 2014, dan juga studi pustaka dengan membaca buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Sugiyono (2009), dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sampel terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis sampel, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh sampel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dengan demikian metode analisis data adalah cara untuk melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik) yang akan di uji dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0.

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi data perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Diuji menggunakan *software* SPSS versi 21.0.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS for Windows. Penggunaan metode analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi terdiri dari uji normalitas, uji multikolonearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedasitas.

3.3.2.1

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji ini memiliki tujuan yaitu menguji apakah residual pada model regresi berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah

memiliki residual yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini dapat menggunakan hasil atas estimasi residual dan *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar atas pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah probabilitas. Jika $p\text{-value} > 0,05$, maka menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

Data harus diuji dengan menggunakan uji normalitas sebelum dianalisa. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data disimpulkan berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang diperoleh ($p\text{ value}$) lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 5\%$). Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai ($\alpha = 5\%$) maka data disimpulkan tidak berdistribusi normal (Uyanto, 2009).

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan adanya korelasi linear antara variabel independen dalam sebuah model regresi (Damodar Gurajati dan Dawn C. Potter, 2012). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflating Factor* (VIF). VIF (*Variance Inflating Factor*) yaitu $1/\text{tolerance}$. Model regresi dapat dikatakan dengan baik apabila tidak adanya korelasi di antara variabel independen. $VIF < 10$ menandakan tidak adanya korelasi di antara variabel independen. $VIF > 10$ menunjukkan bahwa ada korelasi di antara variabel independen dan dapat dikatakan terjadi multikolinearitas.

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan apakah terjadi ketidaksamaan *variance* residual dalam model regresi yang berasal dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah yang homoskedastisi. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dengan menggunakan uji *Park*. Uji *Park* dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual ($Lnei2$) dengan masing-masing variabel independen (X_1, X_2, X_3 dan X_4).

Uji ini bertujuan untuk menegaskan bahwa *variance* dari residual dalam model regresi adalah konstan pada semua pengamatannya, tidak membesar atau mengecil pada nilai X (variabel independen) yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan dalam uji *Park* adalah dengan melihat nilai $P\text{-value}$ yaitu pada kolom Sig., apabila nilai Sig. $> 0,05$ maka tidak ada gejala heteroskedastistias (Imam Ghozali, 2009).

3.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengkaji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Imam Ghozali, 2009). Pengambilan keputusan ada tidaknya

autokorelasi dalam uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut (Imam Ghazali, 2009 : 100) :

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan (4-du), maka koefisien korelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.3.3 Uji Korelasi (R)

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antar 2 (dua) variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen Imam Ghazali (2009 : 82).

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi yang ditentukan meliputi korelasi berganda dan korelasi parsial, nilai korelasi $-1 \leq r \leq 1$.

- a. Jika $r = -1$ atau mendekati -1 , maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah sangat kuat tetapi negatif, dapat diartikan jika variabel independen naik maka variabel dependen akan turun dan sebaliknya.
- b. Jika $r = 0$ atau mendekati 0 , maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah lemah sekali yang berarti tidak ada atau dapat dikatakan lemah. Maka dengan demikian dapat dikatakan pula antara variabel independen dengan variabel dependen tidak ada hubungan.
- c. Jika $r = 1$ atau mendekati 1 , maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah sangat kuat tetapi positif (jika variabel independen naik maka variabel dependen akan naik dan sebaliknya). Koefisien korelasi ditentukan dengan SPSS. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan tabel berikut :

Tabel 3.1 Ketentuan Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2009)

3.3.4 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sebaliknya, nilai R² yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2009).

3.3.5 Pengujian Hipotesis

Dalam pengelolaan data penelitian menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh sejumlah variabel independen $X_1, X_2, \dots, X_k$ terhadap variabel dependen atau memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen $X_1, X_2, \dots, X_k$ (Uyanto, 2009).

Model regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

Y = variabel terikat penghindaran pajak

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

X_1 = Risk

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Leverage

X_4 = Pertumbuhan Penjualan

e = error

Setelah melakukan pengujian normalitas dan pengujian atas asumsi-asumsi klasik, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian atas hipotesis. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R²), dan nilai statistik t. perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H₀ ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H₀ tidak dapat ditolak Ghozali (2009).

a. Uji Signifikansi Model (Uji Statistik F)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (Imam Ghozali, 2009).

Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : minimal salah satu $\beta_i, i=1,2,3 \neq 0$, Ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) H_0 ditolak jika, $p\text{-value} < \alpha$
- 2) H_0 diterima jika, $p\text{-value} > \alpha$
- b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
 Uji t digunakan untuk mengetahui faktor fundamental manakah dari variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 1 (satu) penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Imam Ghazali, 2009).

Aturan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, yaitu:

- 1) H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\text{-value}$ (probabilitas signifikansi) $> \alpha$
- 2) H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value}$ (probabilitas signifikansi) $< \alpha$

3.4 Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Agar variable-variabel dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan jelas, serta untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan pengertian disini, maka perlu pembatasan dari variable dalam penelitian ini, antara lain:

TABEL 3.2 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Risk</i> (X_1) Paligrova (2010)	$RISK = \sqrt{\sum_{T=1}^T (E - 1/T \sum_{T=1}^T E)^2 / (T - 1)}$	Rasio
2	<i>Size</i> (Ukuran Perusahaan) (X_2) Yusuf & Soraya (2004)	<i>Ukuran Perusahaan = Ln (Logaritma Natural) . Total Aktiva</i>	Rasio
3	<i>Leverage</i> (X_3) Brad Badertscher at al, (2009)	$Leverage = \frac{Total\ Kewajiban\ Jangka\ Panjang}{Total\ Asset}$	Rasio
4	Pertumbuhan Penjualan (<i>Sales Growth</i>)(X_4) Brad Badertscher	$Sales\ Growth = \frac{Sales(t) - Sales(t - 1)}{Sales(t - 1)}$	Rasio

	at al.,(2009)		
5	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)(Y) Dyreg at al., : (2010)	$CASH ETR = \frac{Pembayaran Pajak}{Laba Sebelum Pajak}$	Rasio

*Sumber : Diolah Penulis (2015)

4 ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dengan data sampel 7 perusahaan Tambang Sub sektor Batu bara di Indonesia yang listed dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian dari 2010-2014.

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistik atas variabel-variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan *SPSS 21.0*.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RISK	35	3	67	27.71	13.363
UKURAN PERUSAHAAN	35	13	18	15.71	1.319
LEVERAGE	35	0	43	18.43	15.905
PERTUMBUHAN PENJUALAN	35	0	136	25.43	31.286
PENGHINDARAN PAJAK	35	18	90	33.14	14.271
Valid N (listwise)	35				

*Sumber : Output SPSS 21.0

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa banyaknya unit penelitian (N) adalah 35. Jumlah tersebut merupakan total sampel perusahaan Tambang Sub sector Batu bara selama 5 tahun pengamatan pada penelitian dari tahun 2010 sampai 2013 dimana setiap tahunnya terdapat 7 perusahaan Tambang Sub sektor Batu bara yang menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan table 4.2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. *Risk* memiliki nilai terendah 3, nilai tertinggi sebesar 67 dan rata-rata *Risk* sebesar 27,71 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 13.363.
2. Ukuran Perusahaan memiliki nilai terendah 13, nilai tertinggi sebesar 18 dan rata-rata Ukuran Perusahaan sebesar 15,71 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 1,319.
3. *Leverage* memiliki nilai terendah 0, nilai tertinggi sebesar 43 dan rata-rata *Leverage* sebesar 18,43 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 15,905.
4. Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai terendah 0, nilai tertinggi sebesar 136, rata-rata Pertumbuhan Penjualan sebesar 25,43 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 31,286.
5. Penghindaran Pajak memiliki nilai terendah 18, nilai tertinggi sebesar 90 dan rata-rata Penghindaran Pajak 33,14 dengan rata-rata penyimpangan 14,271.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

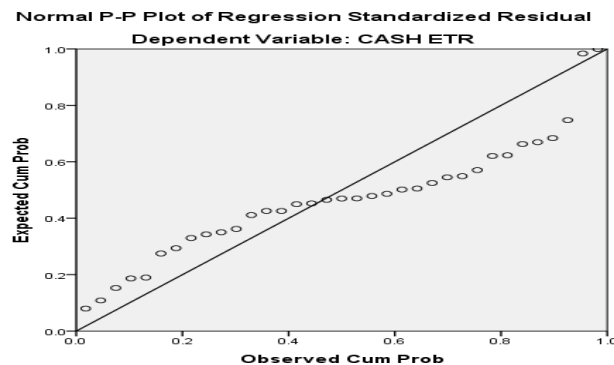
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	11.14117699
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.219
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.297
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

* Sumber : Output SPSS 21.0

Pada tabel 4.3 dapat dilihat nilai *p-value* sebesar 0,069 yang menunjukkan bahwa (*p-value*) $0,069 > (\alpha) 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji normalitas ini juga dapat dilihat secara grafik *normal probability plot* dan histogram, sebagai berikut :



*Sumber : Output SPSS 21.0

Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik nilai data terletak kurang lebih dalam suatu garis lurus, sehingga dapat dikatakan data berasal dari suatu populasi yang terdistribusi normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
RISK	.498	2.010
UKURAN PERUSAHAAN	.712	1.404
LEVERAGE	.604	1.655
PERTUMBUHAN PENJUALAN	.677	1.477

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai *tolerance* Risk sebesar 0,498, Ukuran Perusahaan sebesar 0,712, *Leverage* sebesar 0,604 dan Pertumbuhan Penjualan sebesar 0,677.
- 2) Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF Risk sebesar 2,010, Ukuran Perusahaan sebesar 1,404, *Leverage* sebesar 1,655 dan Pertumbuhan Penjualan sebesar 1,477. Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.391	.309	11.861	1.801

a. Predictors: (Constant), *Risk*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

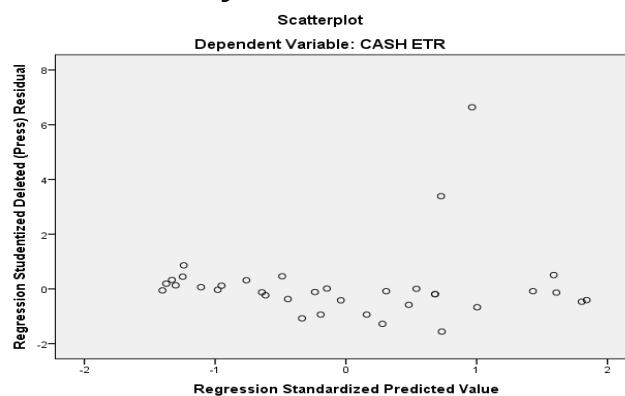
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Pada tabel 4.5 menunjukkan nilai DW = 1,801 dengan nilai tabel DW dengan $n = 35$, $k = 4$ dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai du sebesar 1,726 (lihat lampiran), sehingga nilai $4-du = 2,274$. Hasil perbandingan menunjukkan nilai DW = 1,801 yang terletak antara du dan $4-du$, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.1.4 Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



*Sumber : Output SPSS 21.0

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Pada gambar 4.3 grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di bawah dan di atas angka nol. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2 Analisis Koefisien Korelasi (*R*)

**Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Ganda
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 ^a	.391	.309	11.861

a. Predictors: (Constant), *Risk*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

b. Dependent Variable : Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diperoleh angka (*R*) sebesar 0,625. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara *Risk*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.

4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

**Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 ^a	.391	.309	11.861

a. Predictors: (Constant), *Risk*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

b. Dependent Variable : Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Dari hasil pengujian regresi didapat nilai *Adjusted R*² adalah 0,309. Artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak sebesar 30,9% sedangkan sisanya 69,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam pengujian.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.116	29.311		-.618	.541
1 RISK	-.396	.216	-.371	-1.834	.077
UKURAN PERUSAHAAN	3.793	1.827	.351	2.076	.047
LEVERAGE	.078	.165	.087	.475	.638
PERTUMBUHAN PENJUALAN	.047	.079	.103	.593	.558

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Berdasarkan Tabel 4.8 didapat persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

$$Y = (-18,116) + (-0,398)X_1 + 3,793X_2 + 0,078X_3 + 0,047X_4$$

$$Y = -18,116 - 0,398X_1 + 3,793X_2 + 0,078X_3 + 0,047X_4$$

Y = variabel terikat Penghindaran Pajak

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

X_1 = Risk

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Leverage

X_4 = Pertumbuhan Penjualan

Berdasarkan model regresi di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, yaitu :

- Konstanta sebesar -18,116 artinya jika Risk (X_1), Ukuran Perusahaan (X_2), Leverage (X_3) dan Pertumbuhan Penjualan (X_4) dianggap konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) nilainya akan menurun sebesar 18,116%.
- Koefisien regresi variabel Risk (X_1) sebesar - 0,396 bertanda negatif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Risk (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,514%.
- Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (X_2) sebesar 3,793 bertanda Positif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Ukuran

Perusahaan (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 14,323%.

- d. Koefisien regresi variabel *Leverage* (X_3) sebesar 0,078 bertanda positif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan *Leverage* (X_3) mengalami kenaikan 1%, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,038%.
- e. Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Penjualan (X_4) sebesar 0,047 bertanda positif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pertumbuhan Penjualan (X_4) mengalami kenaikan 1%, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,069%.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t (t Test)

**Tabel 4.10 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.116	29.311		-.618	.541
RISK	-.396	.216	-.371	-1.834	.077
1 UKURAN PERUSAHAAN	3.793	1.827	.351	2.076	.047
LEVERAGE	.078	.165	.087	.475	.638
PERTUMBUHAN PENJUALAN	.047	.079	.103	.593	.558

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

*Sumber : Output SPSS 21.0

Pembahasan pengujian secara parsial pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Pengaruh Karakter Eksekutif (X_1) Terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Berdasarkan table 4.10 diatas dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel *Risk* memiliki nilai $|t\text{-hitung}| 1,834 < |t\text{-tabel}| 2,042$ dengan nilai signifikan $0,077 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, sehingga dengan kata lain tidak ada pengaruh *Risk* yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk averse* maka eksekutif tersebut tidak akan melakukan tindakan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif.. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih

bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu I Gusti Ayu Cahya Maharani (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara variable *Risk* sebagai *proxy* Karakter Eksekutif dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh Karakteristik Perusahaan (X_2) Terhadap Penghindaran Pajak (Y).

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan table 4.10 dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t-hitung $2,074 > t\text{-tabel } 2,042$ dengan nilai signifikan $0,047 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_{2a} diterima, sehingga dengan kata lain ada pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset (Hormati : 2009).

Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beropersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ni Nyoman Kristiana Dewi (2014) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesiayang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variable Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak.

b. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan table 4.10 dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel *Leverage* memiliki nilai t-hitung $0,475 < t\text{-tabel } 2,04$ dengan nilai signifikan $0,638 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_{2b} ditolak, sehingga dengan kata lain tidak ada pengaruh *Leverage* yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat

leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung *effective tax rate* (Beban bunga) perusahaan. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Judi Budiman (2012) Universitas Islam Sultan yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara variable *Leverage* dengan Penghindaran Pajak.

c. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan table 4.10 dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai $|t\text{-hitung}| 0,593 < |t\text{-tabel}| 2,042$ dengan nilai signifikan $0,558 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_2c ditolak, sehingga dengan kata lain tidak ada pengaruh Pertumbuhan Penjualan yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka semakin meningkat pula PPN-masukan sehingga walaupun peningkatan penjualan mengurangi pajak penghasilan tetapi justru akan meningkatkan PPN-masukan yang juga harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar penjualan maka akan besar pula biaya yang dikeluarkan sehingga akan mengurangi pendapatan atau laba.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Calvin Swingly (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variable Pertumbuhan Penjualan dengan Penghindaran Pajak.

4.2.5.2 Uji F (F Test)

Tabel 4.9 Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2704.008	4	676.002	4.805	.004 ^b
1 Residual	4220.278	30	140.676		
Total	6924.286	34			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), *Risk*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

*Sumber : Output SPSS 21.0

Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : minimal salah satu $\beta_i, i=1,2,3 \neq 0$, Ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) H_0 ditolak jika, $p\text{-value} > \alpha$, F-hitung < F-tabel
- 2) H_1 diterima jika, $p\text{-value} < \alpha$, F-hitung > F-tabel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung 4,805 > F-tabel sebesar 2,53 pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$ dan nilai *degree of freedom* (30) dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Maka dapat diambil keputusan bahwa H_3 diterima.

Wajib Pajak (Perusahaan selalu berupaya mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t, *Risk sebagai proksi* Karakter Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
2. Berdasarkan hasil uji t, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan sebagai alat ukur Karakteristik Perusahaan, hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
3. Berdasarkan hasil uji F, Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan aktivitas *tax avoidance* di suatu perusahaan adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel dependen lain yang dapat mempengaruhi terhadap

penghindaran pajak serta memperluas sampel penelitian seperti perusahaan jasa, perbankan dan otomotif. Untuk pemimpin perusahaan agar lebih memperhatikan lagi setiap tindakan yang diambil beserta risiko yang akan ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat. Sedangkan untuk pemerintah, diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya, melakukan pengawasan bahwa kegiatan *tax avoidance* yang diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut dilakukan tidak semata-mata untuk menghindari pajak dan masih dalam batas kebiasaan bisnis yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *"Manajemen Keuangan Bisnis"*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2007.
- Agus Sartono. *"Manajemen Keuangan"*, BPFEE, Yogyakarta. 1997.
- Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhri Husein. *"Perpajakan"*. Akademi Perusahaan YKPN. Yogyakarta. 2000.
- Anandita Budi Suryana. Dropbox, *"Reformasi Birokrasi dan Penerimaan Pajak"*. Jakarta: <http://www.pajak.go.id/content/article/dropbox-reformasi-birokrasi-dan-penerimaan-pajak>. 2012.
- Andriani, P.J.A. *"Pajak dan Pembangunan"*. UI Press. Jakarta. 2000.
- Ardana, K.I., Mujiati N., Utama, M.W. *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2012.
- Arini, Riska Irvia. *"Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2005-2008"*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dipenogoro. 2009.
- Ariyanto Taufik. *"Pengaruh Struktur Pemegang Saham terhadap Struktur Modal Perusahaan"*, Jurnal Manajemen Indonesia, No.1, 64-71. 2002.
- Arnold, J Brian dan Michael J McIntyre. *"International Tax Primer"*. Kluwer Law International. 1995.
- Badertscher, Brad., Katz, Sharon P., Rego, Sonya P. *"The Impact Of Private Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance"*. Harvard Business School Working Paper, 10, 63-98. 2009.
- Budiman, Judi. *"Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak"*. Tesis Program Magister Sains & Doktor, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2012.
- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter. *"Dasar-dasar Ekonometrika"*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. *"Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Diensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 6 : 249-260. 2014.
- Dubrin, Andrew J. *"Leadership (Terjemahan)"*. Edisi Ketiga. Prenada Media: Jakarta. 2006.

- Dyrenge, Scott D., Hanlon, Michelle., Maydew, Edward L. *"The Effect Of Corporate Tax Avoidance"*. The Accounting Review, 85, 1163-1189. 2010.
- Erly Suandy, *"Perencanaan Pajak"*, Edisi 1, Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Ferry, M.G., dan Jones, W.H. *"Determinants of financial structure: A new methodological approach"*. Journal of Finance, 01 XXXIV(3). 1979.
- French, Wendell L. *"Human Resource Management"*. Singapore: Houghton Mifflin Company. 2002.
- Fritz, Samuel dan Stephen P. Robin. *"Type and Model Description Research"*. Asian Journal, 2nd Publishing. Pp 115. 2001.
- Ghozali, Imam. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
- Gunadi, *"Transfer Pricing, Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak"*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1994.
- HMN Purwosutjipto, *"Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2"*, Djambatan, Jakarta. 1999.
- Hormati, Asrudin. *"Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance"*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No. 2. 2009.
- Hutagaol, John. *"Perpajakan Isu-isu Kontemporer"*, Jakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Kartini Kartono. *"Pemimpin dan kepemimpinan"*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. *"Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance"*. Buletin Studi Ekonomi. 18: 58-66. 2013.
- Lewellen, Katharina. *"Financing Decisions When Managers Are Risk Averse"*, Working Paper, MIT Sloan School of Management. 2003.
- Low, Angie. *"Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation"*, Fisher College of Business Working Paper, 3(92), 470-490. 2006.
- MacCrimmon, K.R. & Wehrung, D.A. *"Characteristics of Risk Taking Executives"*. Management Science, 36(4): 422-435. 1990.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. *"Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9: 525-539. 2014.
- Mangkoesoebroto, Guritno. *"Ekonomi Publik"*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta. 2001.
- Mangoting, Yenni. *"Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif if Meminimalkan Pajak"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 1, No. 1, Mei 1999: 43-53. 1999.
- Mardiasmo, *"Perpajakan edisi revisi"*, Yogyakarta, Andi. 2003.
- Martono dan D. Agus Harjito. *"Manajemen Keuangan"*. Yogyakarta: Ekonosia. 2002.
- Nugraheni, Fitri dan Dody Hapsoro. *"Pengaruh Rasio Keuangan CAMEL, Tingkat Inflasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan"*

- Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Jakarta*". Wahana, Vol. 10, No.2, Hal: 63-80. 2007.
- Paligorova, Teodora. "*Corporate Risk Taking and Ownership Structure*". Bank of Canada Working Paper, 2010-3. 2010.
- Pearce dan Robinson. "*Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan pengendalian*". Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- R. Soekardono. "*Hukum Dagang Indonesia, Jilid I(bagian pertama)*", Dian Rakyat, Jakarta. 1983.
- Rahayu, Ning. "*Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avodance) Pada Foreign Direct Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) Di Indonesia*". Disertasi Program Doktor dalam Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta. 2008.
- Rohatgi, Roy. "*Basic International Taxation (Second Edition) Volume I: Principles*". New Delhi: Taxmann Allied Services Pvt. Ltd. 2006.
- Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT Citra Aditya bakti, Bandung. 1996
- Singgih Santoso. "*Menggunakan SPSS untuk Statistik Non Parametrik*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2006.
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH. "*Asas dan Dasar Perpajakan*", Penerbit refika Aditama, Bandung. 2006.
- Sondang P. Siagian. "*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*". Jakarta. PT Rineka Cipta. 2009.
- Spitz, Barry. "*International Tax Haven*". Guide, San Diego, New York, Chicago, London, Harcourt Professional Publising. 2001.
- Sriwati Bukit. "*Pendidikan Karakter*". <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/ydom1335154408.pdf>. 2010.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*". CV. Alfabeta: Bandung. 2009.
- Sutarto. "*Dasar-dasar kepemimpinan administrasi*". Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1991.
- Sutrisno, "*Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi)*", Edisi Pertama, Cetakan Kedua, EKONISIA, Yogyakarta. 2003.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. "*Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 10: 47-62. 2014.
- Yusuf, Muhammad dan Soraya. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Asing dan Non-Asing di Indonesia*". JAAI Volume 8 No. 2004.
- Zain, Mohammad. "*Manajemen Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta. 2005.
- www.idx.co.id
www.pajak.go.id
www.stanford.edu